



#### Hambat Pemasukan Daerah

# Dibiarkan Telantar Lahan Eks Tiara Grosir

Denpasar (Bali Post) -

Pemanfaatan lahan eks Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, pascapenutupan pusat perbelanjaan itu, akhir 2014 lalu, hingga kini belum terealisasi. Lahan itu belum digarap Pemkot Denpasar dan tampak dibiarkan telantar. Padahal, semua lahan itu direncanakan untuk UKM Center. Nyatanya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda aktivitas di lahan strategis itu. Kondisi ini mengundang pertanyaan dari kalangan DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mariana Wandhira, Minggu (19/4) kemarin, menilai keputusan Wali Kota Denpasar telah menghambat pemasukan daerah dari pengelolaan lahan tersebut. Sebab, pascapengosongan lahan itu, nasib lahan seluas hampir 90 are tersebut tidak lagi jelas. Menurut Wandhira, makin lama pihak Pemerintah Kota Denpasar mengambil keputusan atas lahan tersebut maka makin banyak akan mengalami kerugian. Pasalnya, gedung dan lahan yang sudah lama tak dimanfaatkan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi Kota Denpasar. "Perlu ada keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan lahan ini," ujarnya.

Wandhira menilai langkah Pemerintah Kota Denpasar sangat lamban dalam mengambil sebuah keputusan. "Ini kan lahan jelas-jelas tempatnya sangat strategis, tetapi kenapa Pemkot Denpasar terus mengulur-ulur waktu untuk memanfaatkan lahan tersebut," imbuhnya

Seperti diberitakan sebelumnya, perjalanan panjang Tiara Grosir dalam melayani konsumennya, akhirnya berakhir. Menyusul, Tim Yustisi yang terdiri dari unsur

Yustisi yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, pecalang, instansi terkait Pemkot Denpasar, memenuhi janjinya untuk menyegel toko grosir pertama di Bali tersebut, Senin (26/5) tahun lalu. Penyegelan dengan cara menggembok pintu utama Tiara Grosir itu dilakukan Camat Denpasar Utara I Made Lodra mewakili Tim Yustisi. Praktis, aktivitas perdagangan di Tiara Grosir berhenti untuk selamanya. Bahkan, tim memberikan waktu hanya tiga hari untuk mengosongkan lahan tersebut dari barangbarang yang dijual selama ini.

barang yang dijual selama ini.

Langkah Tim Yustisi melakukan tindakan tegas ini, bukan tanpa alasan. Tiara Grosir dinilai telah melanggar empat Perda di Kota Denpasar, yakni Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Izin Bangunan, Perda No. 13 Tahun 2002 tentang SIUP, Perda No. 7 Tahun 2005 tentang SITU HO, dan Perda No. 9 Tahun 2009 tentang IUTM. Kisruh Tiara Grosir dan Pemkot ini mencuat lantaran HGB Tiara Grosir yang berakhir Desember 2011, tidak diperpanjang lagi. Pihak Tiara Grosir sudah melakukan upaya perpanjangan baru, Juni 2011. Namun, Pemkot Denpasar tidak menyetujui perpanjangan HGB itu lagi. Alasan Pemkot Denpasar, lahan tersebut akan dipergunakan untuk

kepentingan pemkot dan masyarakat Denpasar secara umum. Pemkot Denpasar akan menjadikan tempat tersebut sebagai UKM Center. (kmb12)

Edisi : Senin, 20 April 2015

Hal  $: \frac{2}{}$ 





### Kasus CPNS V Kejari Periksa 11 Staf DKP

Tabanan (Bali Post) -

Kejari Tabanan kembali memeriksa para staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Penyidik kembali memeriksa 11 orang yang merupakan staf di DKP, di aula Kejari Tabanan. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan tambahan dan terakhir bagi para staf DKP setelah sebelumnya diperiksa berkali-kali bolak-balik ke kantor Kejari.

Kasipidsus Kejari Tabanan Fathur Rohman mengatakan anggotanya terus melakukan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas. Kesebelas saksi yang diperiksa itu berinisial IG Nyoman A, I Nyoman Gede J, I Wayan My, I Wayan Mr, I Gst. Made S, I Nyoman Gede S, I Wayan M, Ni Ketut M, Dewa A, I Wayan S, dan I Wayan P.

Wayan P.

"Para saksi ini mulai diperiksa pukul 11.00 hingga 17.0 wita dan penyidik kami mengajukan sekitar 23 sampai 35 pertanyaan," ucap Fathur.

Pejabat asal Bojonegoro ini juga menjelaskan, mereka yang diperiksa dua hari terakhir adalah para staf DKP. "Sehari sebelumnya juga telah diperiksa 10 orang saksi, dan hari ini kami periksa 11 orang, semuanya staf DKP," bebernya.

Yang menarik pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan terakhir bagi staf. Selanjutnya pihak penyidik akan memanggil saksi yang memiliki peran dalam kasus ini. "Ini pemeriksaan staf terakhir, selanjutnya akan kita panggil para saksi yang memiliki peran seperti kasubag dan yang lainnya," jelas Fathur.

Selanjutnya barulah pihak penyidik melakukan ekspos untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan menjadi tersangka dalam kasus ini. "Kemungkinan minggu depan diperiksa yang memiliki peran, baru nanti akan diekspos siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini," jelasnya. (kmb28)

Edisi : Senin, 20 April 2015.

Hal : 13





#### Penyerahan Pasar Sangsit Badan Pengawas Panggil

# Tokoh Masyarakat

Singaraja (Bali Post) –

Instruksi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T. untak menuntaskan penyerahan pengelolaan Pasar Desa Sangsit, Kecamatan Sawan mulai disikapi Direksi PD Pasar Buleleng bersama Badan Pengawas (BP). Para tokoh masyarakat di desa setempat rencananya akan diundang untuk membahas penyerahan pengelolaan pasar tersebut. Di sisi lain Badan Pengawas berpendapat kalau penyerahan pengelolaan pasar tersebut tidak harus mengubah peraturan daerah (perda), namun bisa dilakukan dengan peraturan bupati (perbup).

Badan Pengawas PD Pasar Buleleng I Ketut Suparto, Minggu (19/4) kemarin menegaskan, setelah pihaknya mempelajari beberapa aturan hukum termasuk perda tentang pasar, ternyata proses penyerahan pengelolaan dari pemkab kepada pihak desa bisa dilakukan dengan perbup, tak mesti menunggu perubahan perda. Dalam perubahan perda nanti hanya mengatur masalah penyertaan modal pemkab kepada PD Pasar.

Terkait dengan itu, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang para tokoh

Desa Sangsit untuk membahas penyerahan pengelolaan pasar tersebut. Pembahasan ini dilakukan untuk membicarakan persoalan kewajiban setelah pasar tersebut diserahkan pengelolaanya kepada pihak desa. Pihak pengelola mempunyai kewajiban menyetorkan keuntungannya sebesar 30 persen setiap bulan. "Dulu kami memberikan desa sebesar 30 persen, sehingga kalau dikelola oleh desa tentu keuntungan sebesar itu wajib disetorkan dan ini kami akan bahas bersama," mantan Sekretaris Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagprin) Buleleng ini.

Di tempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat Desa Sangsit I Ketut Sonen meyambut positif penyerahan pengeloalan pasar di desanya itu hanya didasarkan perbup. Untuk itu, Sonen tetap meminta agar penyerahan pengelolaan pasar itu bisa secepatnya dilakukan. Sementara terkait dengan penyetoran keuntungan, menurut Sonen, pihaknya belum bisa memberikan seperti apa gambaran terkait dengan eyerahan keuntungan itu. Pihaknya memilih menunggu. sampai perbub yang akan diterbitkan. (kmb38)

Edisi : Senin, 20 April 2015

Hal

9





## Tembok SD 3 Songan Roboh

Bangli (Bali Post) -

Tembok SD 3 Songan sepanjang 12 meter ambruk. Ini terjadi akibat kondisi tembok yang sudah rapuh dan retak-retak. Beruntung robohnya

tembok sekolah tersebut tidak sampai mengakibatkan korban jiwa, karena saat kejadian siswa masih belajar di dalam kelas.

Menurut informasi, robohnya tembok tersebut terjadi pada Jumat (17/4) sekitar pukul 11.00 wita. Sesaat sebelum kejadian, tembok tersebut sempat didorong sejumlah siswa yang hendak melihat seekor anjing liar. Pada pagi harinya seorang siswa di sekolah tersebut sempat mendapat serangan anjing liar. Diduga karena tembok sekolah sudah lama rapuh, sehingga setelah mendapat dorongan siswa tembok menjadi tidak kuat dan lantas ambruk.

Kepala SD 3 Songan Ni Wayan Partini saat dikonfirmasi, Minggu (19/4), membenarkan bahwa tembok di sekolahnya roboh Jumat lalu. Tembok yang roboh tersebut panjangnya 12 meter dengan tinggi 1,5 meter. Partini mengatakan, saat tembok itu roboh, sekolah sedang melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas. "Tidak ada anak-anak yang kena, karena semuanya ada di dalam kelas," terangnya.

Menurut Partini robohnya tembok sekolah itu akibat usia tembok yang sudah cukup tua. Tembok sudah mengalami rapuh dan retak-retak. "Kemungkinan karena sudah rapuh sehingga temboknya roboh," ujarnya. Terkait ambruknya tembok tersebut, pihaknya telah melaporkannya ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk segera ditindaklanjuti. (kmb40)

Edisi : Senin, 20 April 2015

Hal : 10





## Terkait Dugaan Penyimpangan di Badung V Kejari akan Minta Konfirmasi PHDI Bali

Denpasar (Bali Post) -

Pihak kejaksaan mendapatkan amunisi tambahan terkait dugaan penyimpangan tirtayatra di Badung, khususnya yang ke India. Menyusul, pernyataan pihak PHDI yang menepis bahwa PHDI pimpinan Sang Nyoman Suwisma ini menerima dana hibah dari Pemkab Badung. Karena kesulitan mendapatkan data di Pemkab Badung, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akan mencari cara lain. Salah satunya, segera mengonfirmasi sekaligus meminta keterangan dari pihak PHDI Bali pimpinan Prof. Gusti Ngurah Sudiana.

"Ini kan baru awal, sebagai pintu masuk. Siapa tahu nanti ada lagi data yang kami dapat, khususnya laporan pihak terkait untuk masuk ke persoalan lain," sebut sumber di kejaksaan, Minggu (19/4) kemarin.

Kasiintel Kejari Denpasar Syahrir Sagir yang dimintai konfirmasi hal itu, Minggu (19/4) kemarin, tidak membantah pihaknya segera memanggil pihak PHDI Bali. Pemanggilan PHDI Bali diprioritaskan menyangkut data yang benar mengenai keberadaan PHDI Badung yang dinilai ilegal. "Kami mesti melihat data yang akurat dulu menyangkut resmi dan tidak resmi, legal atau tidak legalnya kepengurusan PHDI Badung yang menerima hibah dari Pemkab Badung tersebut," ujarnya.

Syahrir Sagir menambahkan, jika data tersebut harus diambil ke sekretariat PHDI Bali, pihaknya akan turun juga ke sana. Itu akan dilakukan secepatnya. Pasalnya, apa yang dikatakan pihak PHDI di sejumlah media, dianggap sebagai pintu masuk terkuaknya dugaan penyimpangan yang terjadi di Pemkab Badung.

Sebelumnya, Kajari Denpasar Imanuel Zebua angkat bicara soal kinerja anggotanya dari Tim Intelijen Kejari Denpasar yang sudah menyambangi Puspem Badung dan Pemkot Denpasar. Khusus untuk di Pemkab Badung, Imanuel Zebua, Jumat (17/4) lalu mengatakan bahwa timnya belum melakukan penggeledahan. Pihaknya masih melakukan puldata (pengumpulan data). "Itu

penugasan, untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan," katanya.

Salah satu metode yang dilakukan adalah wawancara. Yang jelas, adanya informasi penyimpangan tirtayatra khususnya ke India, pihak kejaksaan terus akan melakukan pengembangan. "Saat ini masih dalam proses," sebutnya. Pun soal sebendel data yang disita, pihak kejaksaan belum mau membebernya, dengan dalih masih dipelajari.

Sementara soal hibah, pihak PHDI Bali menepisnya karena dana yang dikucurkan Pemkab Badung diterima oleh PHDI yang dinilai tidak sah. PHDI saat ini sudah terstruktur, yakni pimpinan pusat Sang Nyoman Suwisma dengan Dharma Adyaksa atau Ketua Sabha Pandita Ida Pedanda Sebali Tianyar dengan Ketua Sabha Walaka Putu Wirata Dwikora. Untuk kepengurusan Bali, Ketuanya adalah Gusti Sudiana Sedangkan di Badung, PHDI dipimpin oleh Made Mulia, namun sudah almarhum dan saat ini Plt.-nya adalah Wayan Sukayasa. (kmb37)

Edisi : Senin, 20 April 2015

Hal : 3





# Tarik Ulur Sewa Kios Pasar Seni Geopark

# Pemkab Jangan Takut Rugi

Bangli (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Bangli diminta untuk tidak takut merugi dalam memutuskan nilai sewa pasar seni geopark di Penelokan Kintamani. Agar pengisian dan penataan bisa segera dilakukan, pemerintah diharapkan dapat memberikan sedikit keringanan nilai sewa khusus terhadap keempatbelas pedagang yang ada di depan pasar Geopark. Keringanan bisa diberikan untuk tahun pertama dan dilakukan penyesuaian sewa di tahun berikutnya.

"Pemerintah harus berani merugi. Berikan dulu mereka keringanan sewa untuk tahun pertama, kalau sudah ada perkembangan di tahun berikutnya baru diberikan sewa sesuai yang sudah ditentukan," kata pengamat pariwisata Bangli Putu Winastra, belum lama ini. Menurutnya, pemberian keringanan nilai sewa itu perlu dilakukan mengingat pasar Seni Geopark di Kintamani yang selesai dibangun pertengahan tahun 2014 lalu itu merupakan pasar baru dan pedagang sama sekali belum memiliki pengalaman berjualan di dalam pasar.

Pemerintah dalam hal ini harus berani merugi demi kepentingan penataan Penelokan. "Apakah sudah ada jaminan pasti dari pemerintah setelah mereka berjualan di dalam maka bisa lebih laris daripada berjualan di tempat sekarang. Untuk itulah, pemerintah harus berani merugi,

Kebijakan keringanan sewa tersebut kata Winastra bisa dibuat dalam bentuk perjanjian. Keringanan bisa diberikan pada

tahun pertama. Jika pada tahun kedua sudah terlihat ada perkembangan dalam pasar tersebut, barulah pemerintah bisa memberlakukan nilai sewa sebagaimana yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dengan adanya kebijakan keringanan sewa tersebut, dia meyakini pengisian pasar geopark bisa segera dilakukan. Sehingga penataan Penelokan pun bisa

Sebagaimana yang diketahui selama ini hingga memasuki bulan April, pasar yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu tak kunjung ditempati pedagang. Ini disebabkan karena belum adanya titik temu mengenai besaran sewa yang disepakati Pemkab Bangli bersama 14 pemilik kios yang ada di depan pasar tersebut. Para pedagang selama ini ngotot meminta keringanan nilai sewa jauh dari nilai sewa yang disodorkan Pemkab Bangli Rp 2,7 juta per unit per tahun. Mereka menolak keinginan pemkab karena merasa tanah yang ditempati saat ini adalah lahan pribadi mereka. (kmb40)

: Senin, 20 April 2015 Edisi

Hal